

**ANALISIS KRITIS KEBIJAKAN PROGRAM RUMAH SUBSIDI  
DI KOTA PEKANBARU****Abiyya Pingkani Aurilia<sup>1</sup>, Diana Dwi Paramitha<sup>2</sup> dan Ridha Nurhayati<sup>3</sup>**<sup>1, 2 dan 3</sup>Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Kampus Panam Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 15, Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru

Email : 12070523265@students.uin-suska.ac.id<sup>1</sup>,12070523534@students.uin-suska.ac.id<sup>2</sup> dan 12070523279@students.uin-suska.ac.id<sup>3</sup>**ABSTRAK**

Rumah subsidi memiliki keterbatasan penyediaan perumahan, tingginya harga rumah dan produk konsumen yang rusak. Tujuan penelitian mengetahui implementasi kebijakan program yang dilakukan oleh pemerintah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian pemerintah sebagai lembaga untuk mensejahterakan masyarakatnya dalam pelaksanaan membutuhkan pengembang swasta, teori Jann dan Wegrich mengenai pelaksanaan kebijakan dipengaruhi beberapa unsur saling berkaitan spesifikasi rincian program, alokasi sumber daya, dan keputusan yang dilakukan pemerintah dalam program rumah subsidi Kota Pekanbaru.

**Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi dan Rumah Subsidi.****ABSTRACT**

*Subsidized housing has limited housing supply, high house prices and damaged consumer products. The purpose of the study is to determine the implementation of program policies carried out by the government. The method used is descriptive qualitative with a literature study approach. The results of the study of the Government as an institution for the welfare of its people in implementing the need for private developers, Jann and Wegrich's theory of policy implementation is influenced by several interrelated elements, program specifications, resource allocation, and decisions made by the government in the Pekanbaru City subsidized housing program.*

**Keywords : Policy, Implementation and Subsidized House.**

**PENDAHULUAN**

Indonesia bukanlah satu-satunya Negara yang membuat kebijakan subsidi rumah murah bagi masyarakatnya. Negara- Negara lain di Asia, bahkan Negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris juga memiliki program yang sama. Konsep yang dimiliki Negara pemberi subsidi perumahan memang tak sama dengan Indonesia. Namun, semua program bertujuan untuk memberi kesempatan bagi masyarakatnya untuk memiliki rumah layak huni dengan harga yang terjangkau. Sebagai contoh di China, dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, Negeri Tirai Bambu itu memiliki program perumahan terjangkau untuk rakyatnya. Pemerintah China menyediakan area seluas 20 ribu hektar yang khusus disediakan untuk pembangunan rumah dengan harga terjangkau. Program rumah subsidi ini juga berlaku di California, Amerika Serikat dengan memberikan bantuan sewa bersubsidi untuk rumah tangga berpenghasilan rendah. Sebagian besar program bantuan sewa yang didanai pemerintah federal, sewa bulanan ditetapkan 30% dari pendapatan rumah tangga mereka.

Perumahan subsidi merupakan salah satu program yang disediakan oleh pemerintah untuk orang-orang yang berpendapatan dibawah rata-rata. Sebagai salah satu bagian dari kebutuhan hidup, rumah atau tempat tinggal menjadi prioritas untuk dimiliki. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur kementerian (PUPR) dan UU RI Nomor 1 Tahun 2011 menjelaskan bahwa rumah subsidi adalah rumah yang dibangun layak huni dengan harga terjangkau yang diperoleh melalui skema KPR baik secara konvensional maupun skema syariah. Perumahan subsidi memberikan solusi pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) karena telah mendapatkan bantuan dari pemerintah yang tidak

memberikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) layaknya rumah komersial. Pemerintah menyediakan rumah subsidi pada anggaran tahun 2021 dengan 4 program bantuan pembiayaan rumah, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR bersubsidi, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). (Arif Gunawan, 2017).

Perumahan subsidi ini penting disediakan mengingat salah satu permasalahan utama dalam bidang perumahan dan pemukiman adalah keterbatasan penyediaan perumahan atau *backlog* (Kementerian PPN/Bappenas). Tingginya kebutuhan atas rumah mengakibatkan tingginya harga rumah. Hal ini akan menimbulkan hambatan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) dalam mewujudkan impian untuk membeli rumah. Program Rumah subsidi ini umumnya yang dikeluhkan masyarakat adalah produk konsumen yang rusak dan keluhan pengguna rumah subsidi setelah beberapa lama dihuni. (Bramantyo, Wido Prananing Tyas. 2019). Dikeluhkan oleh konsumen seputar kualitas bangunan murah, akses jalan yang kurang baik, tidak adanya sarana dan prasarana umum, dan abai dalam pengelolaan lingkungan. (A.A Ngr Agung Gd Parmadi, 2018). Padahal program MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) merupakan salah satu misi pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Selain itu, target pemerintah yang seharusnya menyediakan program rumah subsidi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpendapatan dibawah rata-rata tetapi masih banyak masyarakat tersebut yang tidak kebagian untuk mempunyai kesempatan dalam kepemilikan rumah disebabkan ulah orang-orang kaya yang membeli dan merenovasi rumah tersebut untuk mereka tempati sendiri. (Eka Dyah Kartiningrum.

M. Kes, 2018). Masyarakat mengeluhkan hal ini kepada pemerintah agar program rumah subsidi ini lebih diperhatikan lagi arahnya ditujukan kepada masyarakat golongan mana agar tujuan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat nya dapat terealisasi. (Hanifah, 2021).

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan data dari beberapa jurnal dan sumber terpercaya untuk mendapatkan beberapa referensi ataupun perbandingan krisis program rumah subsidi dari pemerintah terutama pada wilayah Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan jangka panjang yang selalu dikeluhkan pada Masyarakat yang Berpendapatan Rendah (MBR).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengimplementasian suatu kebijakan merupakan puncak dari suatu peraturan ataupun kebijakan tersebut dibuat. Tahap pengimplementasian secara umum merupakan bagaimana suatu kebijakan yang dikeluarkan yang menjadi suatu jawaban dari masalah yang dialami masyarakat diterapkan agar maksimal dan dapat menjawab masalah tersebut. Kebijakan Program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) merupakan program yang telah ada sejak tahun 1976 dan sudah berlangsung selama 38 tahun sampai saat ini, selama perjalanan waktu pola dan konsep subsidi sempat mengalami perubahan. Kini yang berlaku adalah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau subsidi bunga dalam tempo hingga kredit selesai. Menurut Jann dan Wegrich (2007) menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan mencakup unsur-unsur inti sebagai berikut :

a. Spesifikasi rincian program, yakni bagaimana dan dimana lembaga atau

organisasi menjalankan program dan bagaimana hukum ditetapkan dalam program tersebut.

- b. Alokasi sumber daya, yakni bagaimana anggaran didistribusikan, anggota yang akan melaksanakan program dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program.
- c. Keputusan, yakni bagaimana keputusan akan dilakukan.

Menurut Thomas R. Dye (dalam Pasalong, 2014 : 39) kebijakan yaitu suatu pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Setiap pilihan yang diambil pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas untuk kepentingan publik, tindakan alternatif yang diambil pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan demi kepentingan publik. Kebijakan dalam praktik mempunyai dua pengertian, yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan dalam arti kebebasan, kebijakan yang ada pada diri seseorang untuk bebas memilih pilihan alternatif yang akan diterima dan dipilih secara baik berdasarkan nilai-nilai hidup sosial dalam penggunaan kekuasaan untuk mengatasi permasalahan yang ada.
2. Kebijakan dalam arti jalan keluar, untuk mengatasi suatu masalah manusia dalam hidup sosial atau Negara dari hasil kebebasan hak untuk memilih yang terbaik berdasarkan nilai-nilai nya.

Menurut Teori Donald Van Meter dan Van Hom (dalam Agostino, 2006 : 139) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu tertentu atau pejabat (kelompok pemerintah), atau proyek swasta untuk diarahkan pada tujuan yang telah digariskan dalam sebuah keputusan kebijakan. Hal ini menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh variabel bebas atau independent

variable. Variabel bebas itu adalah : 1. Ukuran dan tujuan kebijakan, 2. Sumber-sumber kebijakan, 3. Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, 4. Komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, 5. Sikap para pelaksana dan 6. Lingkungan ekonomi sosial dan politik. Konsep Implementasi dapat disimpulkan bahwa kebijakan itu mengarah pada suatu aktivitas atau suatu kegiatan yang dinamis dalam melaksanakan program dan menetapkan tujuan kebijakan sehingga mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Rudi Handoko dan Pandu Patriadi (2005 : 43) subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada pengembang proyek swasta untuk mencapai tujuan tertentu agar mereka dapat memproduksi dan mengkonsumsi produk dengan kuantitas yang bagus dan harga yang terjangkau. Pemberian subsidi untuk konsumen atau masyarakat dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berdampak pada perkembangan ekonomi suatu negara. Pemerintah dalam program pembinaan mempunyai hak untuk mengalokasikan dana demi terwujudnya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Pasal 2 ayat (1) bahwa FLPP bertujuan untuk mendukung kredit atau pembiayaan pemilik rumah sederhana sehat (KPR RSH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan membangun perumahan produktif. Perkarangan rumah di kawasan itu dikelola dengan kegiatan produktif. Program ini untuk menyelesaikan

program sejuta rumah yang digagas oleh Presiden RI, Joko Widodo. Rencananya ada 850 rumah subsidi bakal dibangun di Kota Pekanbaru. Pemerintah kota bekerjasama dalam proses pembangunan rumah subsidi dengan pengembang. Rumah ini dibangun dalam rangka sukseskan program sejuta rumah dari pemerintah pusat. Capaian program sejuta rumah Indonesia terdiri dari 447.994 unit untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada pasal 2 ayat (1) bahwa FLPP bertujuan untuk mendukung kredit/pembiayaan pemilikan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Untuk melihat implementasi kebijakan rumah subsidi di Kota Pekanbaru berdasarkan indikator analisis kebijakan teori Jann & Wegrich yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh beberapa unsur yang saling berkaitan. Unsur-unsur tersebut yaitu spesifikasi rincian program, alokasi sumber daya, dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dalam program rumah subsidi Kota Pekanbaru.

#### 1. Spesifikasi rincian program

Rencana pengembangan rumah subsidi dalam kawasan pemukiman Kota Pekanbaru adalah seluas kurang lebih 31,502 Ha. Arah pengembangan kawasan pemukiman ini dilakukan pada Kecamatan Tenayan Raya, dan Kecamatan Rumbai Pesisir. Kecamatan Tenayan Raya ditunjuk sebagai penyediaan lahan rumah subsidi karena daerah ini termasuk kawasan pinggir kota yang cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan perumahan. Hal ini dikarenakan padatnya kawasan dekat

pusat kota sehingga sulit untuk mendapatkan lahan yang cukup luas, kemudian harga lahan yang cukup tinggi di kawasan sekitar pusat kota membuat *developer* sulit mengembangkan rumah subsidi. Oleh karena itu kawasan pengembangan rumah di daerah pinggiran kota Pekanbaru memberikan kesempatan untuk para pengembang dapat membangun perumahan di lahan yang luas agar bisa dipertimbangkan dengan harga jual rumah subsidi. Hal ini juga memberikan peluang untuk kota agar dapat memperluas kegiatan menjadi lebih produktif. Proses pembangunan rumah subsidi selanjutnya terletak di Kecamatan Rumbai pesisir yang berada di Kelurahan Agrowisata. Pemerintah mempunyai tujuan untuk memajukan tempat wisata agar dapat memajukan UMKM masyarakatnya. Selain itu, akses rumah menuju perkotaan dan tempat bekerja jadi lebih terjangkau karena jarak yang tidak begitu jauh. Target untuk penghuni rumah dari ASN dan MBR yang pasti memerlukan tempat yang strategis.

## 2. Alokasi sumber daya

Adapun anggaran dari pengalokasian rumah subsidi di Kota Pekanbaru melalui data sekunder yang diperoleh dari website [indonesiabaik.id](http://indonesiabaik.id), salah satu upaya dari Kementrian PUPR adalah dengan menargetkan 222.876 unit bantuan pembiayaan Tahun Anggaran (TA) 2021-2022. Ada dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Untuk alokasi FLPP sebanyak 157.500 unit senilai Rp.16,66 triliun dilengkapi SBUM senilai Rp. 630 miliar. Kemudian, BP2BT 39.996 unit senilai Rp.1,6 triliun dan Tapera dari dana masyarakat untuk 25.380 unit senilai Rp.2,8 triliun. Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan yang diberikan kepada penerima KPR Bersubsidi sebesar Rp.4.000.000,-

## 3. Keputusan

Dengan beberapa kebijakan yang ada, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertekad pada tahun yang akan datang yakni 2023 pemerintah akan menambah kuota penerimaan bantuan pembiayaan perumahan senilai Rp.4,64 triliun dari dana masyarakat untuk 54.924 unit rumah. Artinya, total target penyaluran bantuan subsidi perumahan tahun 2023 sebanyak 274.924 unit senilai Rp.34,17 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.29,53 triliun dan dana masyarakat Rp.4,64 triliun. Tentunya dengan jaminan fasilitas yang memadai dan memuaskan masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang ada untuk rumah subsidi layak huni. Dengan perjanjian antara pemerintah dan pihak pengembang harus betul-betul dipastikan menghasilkan produk tempat tinggal yang layak huni bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) dengan penerapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan dapat disimpulkan rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia ,rumah sebagai tempat berlindung dan beristirahat yang sangat dibutuhkan oleh manusia selain kebutuhan pokok lainnya seperti makanan,pakaian, dan kebutuhan pelengkap lainnya. Pemerintah sebagai lembaga untuk mensejahterakan masyarakatnya sesuai amanat undang-undang dalam pelaksanaannya membutuhkan pengembang yaitu swasta. Salah satunya diwujudkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru selaku pemerintah kota daerah di Riau sebagai pihak swasta. Program pemerintah dalam membangun Riau kedepannya dalam sektor perumahan dan menjadikan Riau sebagai etalase Indonesia bagian barat hal

ini berdampak pada perumahan subsidi di Riau semakin cerah dan menjanjikan.

Dengan pengamatan implementasi kebijakan oleh teori Jann dan Wegrich menghasilkan bahwa pelaksanaan kebijakan memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan dengan kebijakan oleh pemerintah dengan spesifikasi rincian program, alokasi sumber daya dan keputusan untuk mewujudkan rumah subsidi yang layak huni bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR). Tentunya dengan jaminan fasilitas yang memadai dan memuaskan masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang ada untuk rumah subsidi layak huni. Dengan perjanjian antara pemerintah dan pihak pengembang harus betul-betul dipastikan menghasilkan produk tempat tinggal yang layak huni bagi masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) dengan penerapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

### Saran

Dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur kementerian (PUPR) dan UU RI Nomor 1 Tahun 2011 agar dapat mengatasi segala permasalahan yang ada dalam program rumah subsidi. Dengan kerjasama yang dilakukan dengan pihak pengembang (swasta) dapat memberikan perubahan atas implementasi kebijakan yang ada. Terutama pada kegiatan pengawasan lapangan dari pemerintah kepada pihak swasta dalam merealisasikan program rumah subsidi. Agar tidak adanya keluhan masyarakat atas birokrasi pemerintah yang kurang efektif.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada rekan-rekan yang terlibat dalam pengerjaan karya ilmiah ini. Terwujudnya karya ilmiah ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-

tulusnya kepada Dosen Bapak Khairunisyah Purba, S.Sos., M.Si selaku pembimbing mata kuliah Metode Penelitian, dan Jurnal Yudabbiru yang telah membantu dalam penerbitan untuk melengkapi tugas Ujian Tengah Semester Metode Penelitian.

### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A.A Ngr Agung Gd Parmadi. (2018). Implementasi Kebijakan Program Rumah Bersubsidi di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. *Jurnal Administrasi Publik Vol 3 No. 1* (34 – 45)
- Arif Gunawan (2020). Permasalahan Pengembangan Rumah di Riau. *Jurnal Administrasi Publik Vol 2 No. 2* (15 - 25)
- Firdaus Agus, Septia Fanny, Rona Muliana (2020). Efektifitas Implementasi Program Perumahan Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Pekanbaru (Studi Kasus : Kecamatan Tenayan Raya). *Jurnal Saintis Vol.20 No 2* (101 – 109)
- Sofian (2021). Birokrasi Untuk Memeproleh Rumah Subsidi. *RiauPos.co*
- Muhammad Firhansyah (2020). Pungli di balik Rumah Subsidi. *Ombudsman RI*
- Agus Suriyansyah (2019). Efektifitas Program Bantuan Perumahan Subsidi dan Manfaatnya Bagi Masyarakat Kecil Di Kubu Raya (Studi pada PT. Fachri Property). *Jurnal Patanjala Vol 6 No 1* (149 – 160)
- Gusti Ngurah Wiras Hady, Rifad Y.Y. Maromon, Deбри A. Amabi (2020). Kajian Proses Pengembangan Rumah Subsidi Secara Mandiri di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Gwang vol 2 No 2* (57 – 62)
- Dora Kusumastuti (2017). Kajian terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Pemberian Subsidi di Sektor

- Perumahan. *Jurnal Yustisia Vol 4 No 3 (541- 555)*
- Bramantyo, Wido Prananing Tyas, Arfi Agriyantoro (2019). Aspek Kualitas Rumah Subsidi Pada Program Rumah Murah Berdasarkan Perspektif Penerima Manfaat (Studi Kasus : Perumahan Subsidi Mutiara Hati Semarang). *Jurnal Pemukiman Vol 14 No 1 (1 – 9)*
- Olga Oktavia (2020). Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Debitur Dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Bersubsidi. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis Vol 3 No 3 (10-18)*
- Andre Yordan, Zulkarnain, Alfi Furwanti Alwi (2019). Analisis Bauran Pemasaran Terhadap Minat dan Keputusan Pembelian Perumahan (Rumah Sederhana) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis Vol. 11 No. 1 (1- 22)*
- Eka Dyah Kartiningrum. M. Kes (2018). Panduan Penyusunan Studi Literatur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol.2 No. 2 (22-26)*
- Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2016) tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran KPR bersubsidi, Batasan harga Jual Rumah Sejahtera, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan
- M. R Andrianto and R.A Rahadi. (2021). Determinant Influencing Factors For Subsidized House Preferences in Bandung Regency. *European Journal of Business and Management Research*
- Dimas Dwi Anggoro, Rosalita Rachma, Katharina S. Sarman (2019) Tax Incentive on Subsidized Housing in Kupang City. *Advances economics, Business and Management Research, Vol 154*
- C.J Gabbe & Gregory Pierce (2020). Extreme Heat Vulnerability of Subsidized Housing Residents in California. *Journal information*
- Sarjan M (2022). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Sektor Pembangunan Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Yudabbiru ISSN (Online) : 2656-3983 (Hal. 60-74)*
- Syafriza, Mayarni (2021). Efektifitas Program Rumah Khusus Nelayan di Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. *Jurnal Kebijakan Publik Vol 12 No 2(55 – 112)*
- Abdullah Ramadani, Muhammad Ali Ramadhani (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik Vol 11 No 1 (1-12)*
- Junizan (2020). DPD REI Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Mengembangkan Perumahan Rakyat. *Jurnal JomFisip Vol 1 No 2 (1-8)*
- Septia Fanny (2019). Analisis Efektifitas Implementasi Program Perumahan Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus : Kecamatan Tenayan Raya).
- Nahdah Dzakiyah Ratwah (2022). Implementasi Kebijakan Program Rumah Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Jurnal Publika Vol 11 No 1 (1489-1502)*